# DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PENANGKARAN BENIH KELAPA DI KABUPATEN GORONTALO

**Wawan Moh. R. Dien[1], Merita Ayu Indrianti[2], Moh Muchlis Djibran[3] Dewa Oka Suparwata[4]**

[1,2,3,4] Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
mmjibran17@umgo.ac.id

## *ABSTRACT*

*The development of coconut seed breeding businesses in Gorontalo Regency plays an important role in supporting the agricultural sector, particularly in providing quality seeds to increase coconut productivity. This study aims to analyze government policy support for the development of coconut seed breeding businesses in the region and identify challenges in its implementation. The research method used is qualitative with a descriptive-explanatory approach, combining descriptive data and analysis of relationships between variables. Data were collected through in-depth interviews with coconut seedling nursery entrepreneurs and government officials, as well as documentation studies related to existing policies and regulations. The results of the study indicate that the Gorontalo Regency government has provided significant support through clear regulations and strategic programs. However, the implementation of these policies is constrained by budget limitations, low interest among young people in seedling cultivation, and a lack of understanding about the importance of high-quality seeds among farmers. This study recommends increasing budget allocations, improving training systems, and providing more attractive incentives to encourage young farmers to participate in coconut seedling cultivation.*

***Keywords:*** *Government Policy, Coconut Seed Breeding, Gorontalo, Challenges, Agricultural Policy, High-Quality Seeds*

## ABSTRAK

Pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan benih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas kelapa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di daerah tersebut serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatori, yang menggabungkan data deskriptif dan analisis hubungan antar variabel. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengusaha penangkar benih kelapa dan pejabat pemerintah, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memberikan dukungan signifikan melalui regulasi yang jelas dan program-program strategis. Namun, implementasi kebijakan ini terkendala oleh keterbatasan anggaran, rendahnya minat generasi muda dalam usaha penangkaran, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya benih unggul di kalangan petani. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan alokasi anggaran, perbaikan dalam sistem pelatihan, serta insentif yang lebih menarik untuk mendorong partisipasi petani muda dalam usaha penangkaran benih kelapa.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Penangkaran Benih Kelapa, Gorontalo, Tantangan, Kebijakan Pertanian, Benih Unggul

# I. Pendahuluan

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman kelapa, yang berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Kelapa tidak hanya menjadi komoditas ekonomi yang penting, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan regional. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi di Gorontalo(Ilato et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan sektor kelapa, khususnya dalam bentuk diversifikasi produk, sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi wilayah ini.

Diversifikasi produk kelapa, seperti produksi minyak kelapa murni (VCO) dan cocopeat, telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah, termasuk di Desa Bihe yang melaksanakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan petani dan pembukaan peluang usaha baru (Kandowangko et al., 2024). Selain itu, di Kabupaten Tabongo, pengolahan kelapa menjadi kopra dan minyak telah berhasil meningkatkan margin keuntungan yang signifikan, menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan kelapa dapat memperkuat kinerja perkebunan kecil melalui integrasi rantai pasokan (Wahyudi et al., 2022).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo masih terkendala oleh tantangan penyediaan benih berkualitas. Untuk mendukung produktivitas pertanian, kualitas benih harus dijaga melalui seleksi genetik yang baik, budidaya yang tepat, dan teknik pengolahan inovatif. Kebun benih terisolasi dan penyerbukan terkontrol dapat meningkatkan kualitas genetik benih kelapa, yang berdampak pada hasil dan ketahanan tanaman. Metode seperti HPLC dan NIRS kini digunakan untuk menilai kualitas benih kelapa secara efektif (Wilms et al., 2019). Pemerintah berperan penting dalam mendukung pengembangan ini melalui kebijakan seperti subsidi, pelatihan, dan pengawasan kualitas. Program serupa di Sulawesi Utara dan Sri Lanka menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat meningkatkan produksi kelapa dan kesejahteraan petani, meskipun ada perdebatan tentang efektivitasnya (Yusuf et al., 2021).

Namun, meskipun ada kebijakan yang mendukung, pengusaha penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi kendala dalam hal akses terhadap teknologi, modal, dan distribusi benih yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah mempengaruhi pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Gorontalo dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dalam menerapkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa dalam menerapkan kebijakan pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa yang berkualitas di Kabupaten Gorontalo. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk kelapa, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor, penguatan sektor penangkaran benih kelapa akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki implementasi kebijakan pemerintah yang ada, serta mengatasi kendala-kendala yang

dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Gorontalo, khususnya dalam sektor pertanian kelapa.

## II. Kajian Literatur Terdahulu

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan perhatian terhadap kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, khususnya pengembangan usaha penangkaran benih kelapa. Kelapa merupakan komoditas yang sangat penting bagi ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan yang fokus pada pengembangan sektor kelapa berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui beberapa cara, termasuk subsidi benih dan pelatihan untuk petani. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung distribusi benih berkualitas dan memberikan pelatihan bagi petani dapat meningkatkan hasil produksi kelapa (Ilato et al., 2022; Wahyudi et al., 2022). Meskipun demikian, tidak ditemukan studi yang relevan yang secara langsung membahas dampak kebijakan benih kelapa terhadap produktivitas, sehingga masih ada gap dalam penelitian mengenai hal ini.

Dalam hal pelatihan petani, penelitian oleh Wijayani et al. (2022) menunjukkan keberhasilan program yang mengajarkan diversifikasi produk kelapa, seperti produksi minyak kelapa murni (VCO) dan penggunaan cocopeat, yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil produksi, yang juga sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa diversifikasi produk kelapa memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal (Kandowangko et al., 2024).

Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan sektor kelapa, tantangan dalam penerapannya masih signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah distribusi benih berkualitas yang tidak merata. Banyak petani masih bergantung pada benih lokal yang kurang berkualitas, yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Meskipun penelitian tentang pentingnya kebijakan yang lebih kuat untuk mempromosikan penggunaan benih unggul telah banyak dibahas secara teori, namun kami tidak menemukan justifikasi yang tepat dalam referensi yang mendukung klaim ini secara lebih mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih spesifik mengenai kebijakan yang dapat meningkatkan distribusi dan akses terhadap benih unggul di daerah-daerah tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan praktik pertanian berkelanjutan menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekosistem pertanian dan produktivitas sektor pertanian kelapa. Penelitian oleh Djibran et al. (2023) menunjukkan bahwa model pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan sejahtera. Praktik ini, seperti penggunaan pupuk organik dan pengelolaan air yang efisien, dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang dalam sektor pertanian kelapa, memperbaiki kualitas tanah, dan meningkatkan hasil produksi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman petani tentang manfaat jangka panjang dari praktik berkelanjutan dan dampak perubahan iklim terhadap hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai adaptasi teknologi ramah lingkungan dan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan keberhasilan implementasi praktik pertanian berkelanjutan dalam sektor kelapa.

Secara keseluruhan, meskipun sejumlah kebijakan telah diimplementasikan untuk mendukung pengembangan sektor kelapa, tantangan dalam penerapannya masih besar. Penelitian lanjutan yang fokus pada efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas benih dan keberlanjutan sektor pertanian kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Keterlibatan aktif dari pemerintah dalam menyediakan insentif dan dukungan bagi petani agar beralih ke praktik agrikultur yang lebih berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengembangan sektor ini. Namun, meskipun sudah ada banyak kebijakan yang mendukung, tidak ditemukan referensi yang secara langsung membahas pentingnya kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong penggunaan benih unggul dan adopsi praktik pertanian berkelanjutan di sektor kelapa

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dengan pemilihan beberapa lokasi yang representatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan kebijakan pemerintah dalam sektor penangkaran benih kelapa. Waktu penelitian telah dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari November hingga Desember 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksplanatori, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi serta menjelaskan hubungan antar variabel, khususnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa. Data yang dikumpulkan akan mencakup data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengusaha penangkar benih kelapa dan pejabat pemerintah, serta observasi langsung di lapangan. Sumber data sekunder termasuk dokumen pemerintah, laporan terkait kebijakan, dan data statistik yang relevan dengan sektor pertanian kelapa.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan respons mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Data yang dianalisis mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan persepsi terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pengusaha penangkar benih kelapa dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan akan menjadi informan kunci. Data sekunder yang diperoleh dari laporan kebijakan dan statistik resmi juga akan digunakan untuk memperkaya analisis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi akan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam, sedangkan analisis deskriptif akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam sektor ini.

## IV. bHasil Dan Pembahasan

### Program Dukungan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Penangkaran Benih Kelapa di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, yakni Bapak Amon S. Lasimpeng, S.P, M.P yang menjabat sebagai Kasie Perbenihan Tanaman Tahunan Bidang Perkebunan, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kebijakan khusus

yang berkaitan dengan pengembangan benih kelapa di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan ini diatur melalui regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang memberikan dasar hukum dalam pengembangan sektor benih kelapa, khususnya dalam mendukung usaha penangkaran. Dukungan pemerintah tidak hanya terbatas pada regulasi atau perda, tetapi juga mencakup penyusunan program-program strategis yang mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa, meskipun belum disebutkan secara eksplisit dalam kuesioner yang diberikan. Regulaasi/perda menjadi bentuk kebijakan yang paling dominan, yang menunjukkan adanya instrumen hukum yang telah disiapkan pemerintah daerah sebagai landasan implementasi kebijakan tersebut.

Tingkat prioritas pemerintah daerah terhadap pengembangan benih kelapa dinilai tinggi oleh informan, yang menunjukkan bahwa sektor ini dipandang penting dalam pembangunan pertanian di Gorontalo. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan komoditas kelapa melalui penyediaan benih yang unggul dan berkualitas. Kebijakan yang telah ditetapkan dinilai cukup efektif dalam mendorong perkembangan usaha penangkaran benih kelapa. Ini terlihat dari keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memberikan dukungan teknis dan administratif kepada para penangkar, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung produksi benih lokal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program secara optimal, seperti pembinaan, pengawasan mutu benih, serta peningkatan kapasitas petani penangkar melalui pelatihan dan penyuluhan. Oleh karena itu, meskipun ada dukungan kebijakan yang kuat, kurangnya alokasi dana yang memadai menjadi kendala dalam mencapai hasil yang maksimal.

Dari wawancara juga terungkap bahwa kerja sama antar instansi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sudah mulai terjalin. Meski demikian, kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga penelitian tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat ekosistem pengembangan benih kelapa yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun kebijakan pemerintah memberikan dukungan yang cukup signifikan, peran serta sektor swasta dan lembaga riset masih perlu dimaksimalkan agar usaha penangkaran benih kelapa dapat berkembang lebih pesat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program dukungan ini, peningkatan alokasi anggaran dan perluasan jaringan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset akan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada di lapangan.

**Kendala yang Dihadapi Oleh Pengusaha Penangkar Benih Kelapa dalam Menerapkan Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Gorontalo**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Hulopi, seorang pengusaha penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha penangkaran benih kelapa adalah keterbatasan anggaran, baik dari sisi internal usaha maupun dari dukungan eksternal pemerintah. Meskipun sudah ada perhatian dari pemerintah daerah, dukungan dana yang tersedia masih belum mencukupi untuk memperluas produksi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pembenihan. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan untuk memenuhi permintaan benih dari berbagai daerah, termasuk dari dinas pertanian kabupaten sekitar dan balai penelitian. Kendala anggaran ini menghambat pelaksanaan program pengembangan usaha penangkaran benih kelapa yang optimal, termasuk pemeliharaan intensif, pengawasan mutu benih, dan pengadaan sarana produksi yang memadai.

Selain keterbatasan anggaran, kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam usaha penangkaran benih kelapa. Bapak Hulopi menyatakan bahwa banyak petani, terutama petani muda, kurang tertarik untuk terlibat dalam usaha penangkaran benih kelapa karena dianggap tidak memberikan keuntungan yang cepat. Produksi benih kelapa memerlukan waktu lama, mulai dari pembenihan hingga masa panen yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara usaha pertanian lainnya dapat memberikan hasil yang lebih cepat. Selain itu, biaya modal yang diperlukan untuk membangun kebun sumber benih dan perawatan tanaman yang intensif menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi petani dengan modal terbatas. Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman petani mengenai pentingnya benih unggul untuk meningkatkan produktivitas kelapa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi petani, perlu ada pelatihan dan penyuluhan yang lebih efektif dari pemerintah dan lembaga terkait.

Tantangan lainnya adalah kebijakan pemerintah yang belum cukup mendalam dalam menyediakan insentif atau bantuan finansial yang memadai untuk petani penangkar. Bapak Hulopi berharap agar kebijakan afirmatif dan dukungan regulasi tidak hanya berhenti pada pemberlakuan perda, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk insentif langsung bagi penangkar dan petani mitra. Dengan adanya insentif ini, diharapkan dapat mendorong lebih banyak petani untuk terlibat dalam usaha penangkaran benih kelapa dan memastikan keberlanjutan pasokan benih unggul. Penyempurnaan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program ini akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan kunci, meskipun regulasi yang ada sudah memadai, namun terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor penangkaran benih kelapa. Meskipun pemerintah daerah sudah menetapkan kebijakan yang mendukung sektor ini, terbatasnya dana untuk riset dan pengembangan (R&D), pelatihan, serta pengawasan kualitas benih menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini mengarah pada ketidakseimbangan antara regulasi yang mendukung dan ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan yang optimal. Keberhasilan pengembangan sektor pertanian sangat bergantung pada dua aspek utama: kebijakan yang diterapkan dan kapasitas petani. Penelitian ini sejalan dengan temuan Hadanu et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pelatihan teknis seperti penggunaan fungi mikoriza arbuskula tidak hanya meningkatkan produktivitas hortikultura tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Hal ini menekankan bahwa untuk mendukung kebijakan pertanian yang ada, kapasitas petani harus ditingkatkan melalui pelatihan yang terfokus, agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai hasil yang optimal dan berdampak positif terhadap sektor pertanian.

Selain itu, Djibran et al. (2023) menyatakan bahwa pengembangan model pertanian berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antar pihak dan pendekatan yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan pertanian. Mereka menekankan bahwa dukungan kebijakan yang efektif harus disertai dengan pendampingan teknis yang memadai untuk meningkatkan kapasitas petani. Pendekatan ini diperkuat oleh Pratiwi & Moeis (2022) yang

menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang baik dan kebijakan yang mendukung dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan dukungan pelatihan yang tepat, petani dapat lebih siap untuk beradaptasi dan mengimplementasikan praktik pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan.

Rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo menjadi kendala signifikan dalam pengembangan sektor ini. Banyak petani muda merasa bahwa usaha penangkaran benih kelapa tidak memberikan keuntungan yang cepat karena proses dari penanaman hingga panen memerlukan waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan temuan Puryantoro et al. (2023) yang menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih tertarik pada usaha pertanian yang memberikan hasil dalam jangka waktu singkat. Selain itu kurangnya minat generasi muda juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan terhadap potensi jangka panjang dari usaha pertanian serta kurangnya akses terhadap informasi yang mendorong mereka untuk mengambil risiko dalam usaha yang membutuhkan investasi besar.

Untuk meningkatkan minat petani muda, pemerintah perlu merancang program yang jelas untuk menunjukkan potensi ekonomi jangka panjang dari usaha penangkaran benih kelapa. Sakti et al. (2024) menunjukkan bahwa generasi muda masih belum sepenuhnya memanfaatkan peluang di sektor pertanian, disebabkan rendahnya pengetahuan mereka. Di sisi lain, Kurniasih et al. (2023) menekankan pentingnya faktor pendidikan dalam meningkatkan keterampilan dan minat petani muda untuk terlibat dalam usaha pertanian. Oleh karena itu, untuk mendukung regenerasi petani, diperlukan program pelatihan yang tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga mencakup pendidikan bisnis dan pengelolaan usaha pertanian yang berkelanjutan, serta menyediakan insentif yang memudahkan mereka memulai usaha ini..

Banyak petani menganggap bahwa usaha penangkaran benih kelapa memerlukan modal yang cukup besar, terutama untuk membangun kebun sumber benih dan menjalani proses sertifikasi yang rumit. Berdasarkan wawancara dengan pengusaha penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa prosedur sertifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan benih bersertifikat seringkali menjadi hambatan bagi petani untuk terlibat lebih dalam dalam usaha ini. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi agar lebih mudah diakses oleh petani, terutama petani kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto & Raisawati (2021) memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam usaha penangkaran benih kelapa adalah prosedur yang rumit dan biaya tinggi yang terkait dengan sertifikasi dan perizinan, yang akhirnya menghalangi petani untuk mengembangkan usaha mereka.

Selain itu,Sugiarto & Raisawati (2021) juga mencatat adanya penurunan penggunaan benih bersertifikat yang dapat dikaitkan dengan tingginya biaya dan prosedur sertifikasi yang tidak efisien. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menyederhanakan proses sertifikasi, memberikan fasilitas yang memadai, dan menyediakan pelatihan untuk membantu petani mengatasi hambatan ini. Dengan kebijakan yang lebih sederhana, serta dukungan dalam bentuk pembiayaan dan akses informasi, diharapkan partisipasi petani dalam usaha penangkaran benih kelapa dapat meningkat, dan ketersediaan benih berkualitas di pasar akan lebih terjamin. Hal ini juga akan mendorong petani untuk berinvestasi lebih banyak dalam usaha penangkaran, serta menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan benih kelapa di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo adalah rendahnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor penangkaran benih kelapa. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menjalin kerja sama dengan sektor swasta, masih banyak pihak yang belum terlibat secara maksimal, termasuk lembaga penelitian dan akademisi yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam hal teknologi dan inovasi. Penelitian oleh Tando et al. (2020) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam konteks pengembangan sektor pertanian. Selain itu, Dustmurodov et al. (2020) menekankan pentingnya mekanisme kemitraan publik-swasta dalam sektor pertanian, di mana interaksi yang lebih baik antara sektor-sektor ini dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian. Oleh karena itu, untuk mempercepat perkembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta untuk memperkuat pengembangan benih kelapa yang berkelanjutan. Kolaborasi yang lebih terencana akan meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi terbaru serta mempermudah aliran informasi dan sumber daya, yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha penangkar benih kelapa.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor penangkaran benih kelapa mempengaruhi berbagai aspek dalam usaha ini, mulai dari kualitas benih yang dihasilkan hingga kapasitas petani untuk mengakses teknologi terbaru. Meskipun ada regulasi yang mendukung, pengalokasian anggaran yang terbatas seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha penangkaran benih kelapa tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan finansial yang memadai dari pemerintah. Penelitian juga menegaskan bahwa pengalokasian dana yang tepat sangat penting untuk intensifikasi sektor pertanian, termasuk sektor penangkaran benih kelapa, yang dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Keterbatasan dana menghalangi akses petani terhadap teknologi yang dapat meningkatkan kualitas benih kelapa, dan menghambat penerapan praktik pertanian modern. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perbenihan yang berkelanjutan dan efektif, serta untuk mendukung inovasi dan pengembangan kapasitas usaha penangkaran benih kelapa di masa depan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengevaluasi kembali alokasi dana untuk program-program yang mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa, dengan memberikan prioritas lebih besar pada riset dan pengembangan teknologi yang mendukung usaha ini. Selain itu, pemantauan yang lebih intensif terhadap pengelolaan anggaran juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pengalokasian anggaran dan pembiayaan akan sangat mempercepat perkembangan usaha ini.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelatihan dan penyuluhan teknis yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menjalankan usaha penangkaran benih kelapa. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai pentingnya benih unggul dan proses penangkaran yang baik, petani cenderung mengabaikan potensi keuntungan jangka panjang dari usaha ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada petani. Hal ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Sudarwati & Nasution (2024), yang menekankan bahwa keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada peningkatan kapasitas petani dan dukungan teknis yang memadai.

Selain itu, peningkatan pelatihan ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali-sekali. Penyuluhan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan terbaru mengenai teknologi dan praktik terbaik dalam penangkaran benih kelapa. Dengan demikian, pengetahuan yang mereka peroleh dapat langsung diterapkan dalam usaha mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan

## V.Kesimpulan (Conclusions)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Gorontalo telah memberikan dukungan signifikan terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa. Kebijakan ini terlihat dalam bentuk kerja sama lintas sektor, seperti kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan sektor benih kelapa. Kerja sama dengan pihak swasta telah memberikan kontribusi terhadap penyediaan teknologi dan kepastian pasar bagi para penangkar benih kelapa, sementara regulasi daerah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan usaha ini. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan teknis bagi petani. Hal ini menghambat pengoptimalan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas benih kelapa yang tersedia.

Kendala utama yang dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa dalam menerapkan kebijakan pemerintah meliputi keterbatasan anggaran yang menghambat ekspansi usaha penangkaran dan pengadaan sarana produksi yang memadai. Selain itu, minimnya minat petani untuk terlibat dalam usaha penangkaran benih kelapa disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan dalam produksi benih dan biaya yang tinggi untuk proses sertifikasi. Banyak petani merasa bahwa usaha penangkaran benih kelapa tidak memberikan keuntungan yang cepat dan membutuhkan investasi yang besar, sementara keuntungan yang didapatkan tidak segera terlihat. Proses sertifikasi yang rumit dan berbiaya tinggi juga menjadi penghalang bagi petani untuk memulai atau mengembangkan usaha penangkaran benih kelapa. Hal ini berpengaruh terhadap partisipasi petani dan keberlanjutan usaha penangkaran benih kelapa secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan dalam penyediaan dana, pelatihan yang lebih intensif, serta penyederhanaan prosedur sertifikasi agar usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak petani di Kabupaten Gorontalo.

## Daftar Pustaka (*References*)

Djibran, Moh. M., Andiani, P., Nurhasanah, D. P., & Mokoginta, M. M. (2023). Analisis Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *2*(10), 847–857. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i10.703

Dustmurodov, G. G., Yunusov, I., Ahmedov, U., Murodov, S. M., & Iskandarov, S. T. (2020). The Mechanism for the Development of Public-Private Partnerships in Agriculture (On the Example of the Republic of Uzbekistan). *E3s Web of Conferences*, *224*, 04042. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022404042

Hadanu, R., Halim, H., Muzuni, M., Basrudin, B., Amin, M., & Nursalam, N. (2024). Pelatihan Pembuatan Fungi Mikoriza Arbuskula Sebagai Solusi Budidaya Hortikultura: Upaya

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 19 Nopember, Kolaka. *Jurnal Abdimas Indonesia*, *4*(4), 1973–1982. https://doi.org/10.53769/jai.v4i4.1083

Ilato, R., Canon, S., Mahmud, H., & Sulila, I. (2022). Superior Commodities of Gorontalo Province: Finding Way for Development Policies. *Central European Management Journal*, 380–388. https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.32

Kandowangko, N. Y., Ahmad, M., Ibrahim, M., & Febriyanti. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo melalui Diversifikasi Kelapa Menjadi Virgin Coconut Oil dan Cocopeat. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *10*(2), 175–182. https://doi.org/10.29244/agrokreatif.10.2.175-182

Kurniasih, D., Syaukat, Y., Nurmalina, R., & Suharno, S. (2023). Persepsi Petani Terhadap Tingkat Kekritisan Risiko Usahatani Bawang Putih Dan Strategi Manajemen Risikonya (Studi Kasus Di Kabupaten Temanggung). *Jurnal Penyuluhan*, *19*(02), 95–112. https://doi.org/10.25015/19202346082

Pratiwi, A., & Moeis, J. P. (2022). Sustainable Farming: Respons Petani Tanaman Pangan Terhadap Kepemilikan Lahan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *22*(1), 43–71. https://doi.org/10.21002/jepi.2022.04

Puryantoro, P., Widjayanti, L., & Rokhani, R. (2023). Pemuda Dalam Pembangunan Pertanian : A Review. *Agrimor*, *8*(4), 197–203. https://doi.org/10.32938/ag.v8i4.2157

Sakti, E. M. S., Marhalinda, M., & Supradaka, S. (2024). Pengembangan Agrowisata Kisuci Menjadi Agrowisata Unggul Dengan Penerapan Teknologi Ekologi, Atraksi Eduwisata, Konten Promosi Media Sosial. *Jurnal Abdi Insani*, *11*(4), 1584–1594. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1926

Sudarwati, L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah Dan Teknologi Pertanian Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Petani Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (Jkakp)*, *3*(1), 1–8. https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847

Sugiarto, E., & Raisawati, T. (2021). Kajian Peranan Sertifikasi Benih Pada Usaha Penangkaran Benih Dalam Mendukung Pembangunan Di Bengkulu. *Pucuk Jurnal Ilmu Tanaman*, *1*(2), 99–106. https://doi.org/10.58222/pucuk.v1i2.18

Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2020). *Collaborative Governance in Overcoming Poverty Problems in Surakarta: A Literature Review*. https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.11

Wahyudi, A., Maskromo, I., & Wulandari, S. (2022). Strategi Peningkatan Kinerja Perkebunan Kelapa Rakyat Melalui Integrasi Vertikal Rantai Pasok Dengan Industri Pengolahan Di Gorontalo. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, *28*(1), 62. https://doi.org/10.21082/jlittri.v28n1.2022.62-76

Wijayani, S., Wirianata, H., & Setyawan, H. (2022). Implementasi Kultur Teknis Di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *Agro Bali Agricultural Journal*, *5*(3), 584–591. https://doi.org/10.37637/ab.v5i3.974

Wilms, H., Rhee, J. H., Rivera, R. L., Longin, K., & Panis, B. (2019). Developing coconut cryopreservation protocols and establishing cryo-genebank at RDA; a collaborative project

between RDA and Bioversity International. *Acta Horticulturae*, *1234*, 343–348. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1234.45

Yusuf, Y., Kindangen, J. G., & Yusron, M. (2021). Revitalization of Economic Development of Coconut Area in North Sulawesi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, *40*(1), 44. https://doi.org/10.21082/jp3.v40n1.2021.p44-57